

BAB IV

KONTEKSTUALISASI PEMIKIRAN UMER CHAPRA TENTANG EKONOMI MONETER ISLAM TERHADAP EKONOMI INDONESIA

A. Relevansi Ke-Indonesiaan

Peran yang dilakukan bank sentral dalam perekonomian suatu negara sangat penting, terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan. Bank Indonesia selaku bank sentral berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-undang RI No. 23 Tahun 1999 adalah lembaga negara yang independen. Dalam kapasitasnya sebagai otoritas moneter, bank Indonesia mempunyai tujuan, tugas dan wewenang yang tidak dimiliki oleh lembaga ekonomi lainnya. Salah satu sasaran tunggalnya yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa serta mengatur dan mengawasi bank.¹

Terminologi kestabilan nilai rupiah paling tidak menimbulkan dua interpretasi. Kestabilan secara internal, yaitu kestabilan harga, atau kestabilan eksternal, yaitu kestabilan nilai tukar. Pilihan atas kedua interpretasi yang berbeda tersebut mempunyai kerangka implementasi yang berbeda dalam hal kerangka kebijakan moneter yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran kestabilan. Dalam mencapai sasaran kebijakan moneter sesuai dengan interpretasi tersebut, bank Indonesia dapat memilih baik target-target kuantitas seperti jumlah uang yang beredar maupun target-target harga seperti suku bunga.²

Indonesia mendapat banyak keuntungan besar dari keterbukaannya perekonomian dunia. Indonesia menikmati hubungan yang sangat dekat dengan

¹Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 14.

²Aulia Pohan, *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 100.

komunitas bantuan internasional, baik donor bilateral maupun organisasi multinasional.³ Perkembangan perbankan syariah dengan cepat, serta jumlah cabang dari bank syariah baik dari bank umum yang berdasarkan syariah maupun divisi syariah dari bank umum konvensional, juga meningkatnya kemampuan dalam menyerap dana masyarakat yang terlihat dari dana simpanan pihak ketiga yang tertera di neraca bank-bank syariah.

Efektifitas kebijakan moneter sangat tergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit (pembiayaan). Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami mengenai masalah bagaimana sektor perbankan akan bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan moneter secara lengkap dan adanya kenyataannya bank terhubung dengan sektor riil melalui aktivitas penyaluran kredit (pembiayaan).

Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh adalah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama. Kita tidak dapat mengandalkan satu instrumen kebijakan saja. Harus ditemukan cara untuk meningkatkan permintaan kredit (pembiayaan) dan mendorong investasi di sektor riil.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang yang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

Efisiensi dan pemerataan tidak dapat direalisasikan hanya dengan sebuah mekanisme filter yang benar. Diperlukan motivasi untuk mendorong individu. Apa

³Hal Hill, Ekonomi Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 90.

yang dilakukan oleh Islam untuk menciptakan keseimbangan demikian adalah dengan menyediakan suatu dimensi spiritual dan berjangka panjang kepada *self interest*. Individu harus memenuhi kepentingan dirinya sendiri di dunia yang sifatnya pendek dan singkat, dan juga akhiratnya yang bersifat abadi. Suatu keseimbangan menurut Al-Qur'an (Ar-Rahman:7-9), mutlak diperlukan untuk menjamin kepentingan social dan pembangunan potensi manusia yang berkelanjutan.⁴

Efisiensi dan pemerataan adalah yang sesuai dengan sasaran-sasaran materil yang secara universal telah diterima. Suatu perekonomian dapat dikatakan telah mencapai efisiensi optimum apabila telah mapu menggunakan keseluruhan sumber daya alam dan manusia yang tersedia dengan sedemikian rupa sehingga arus barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan hajat itu dapat diproduksi dalam jumlah yang cukup maksimal oleh perekonomian yang cukup stabil dan dengan laju pertumbuhan yang berkesinambungan.⁵

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki agar dalam syariat yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqashid syariah*) yang berbeda dalam sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini, yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil. Mereka didasarkan pada konsep-konsep sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayyatan thayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukuwah*), keadilan sosioekonomi.⁶

⁴M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2000), h. 322.

⁵M. Umer Chapra, *Islam and Economic Development*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: Islam dan Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2000), h. 3.

⁶M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, terjemah Ikhwan Abidin Basri: Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institut, 2000), h. 7.

B. Analisis Peluang Implementasi Pemikiran Umer Chapra di Indonesia

Efektifitas kebijakan moneter sangat tergantung pada kondisi dari dunia perbankan, terutama dalam penyaluran kredit (pembiayaan). Agar dapat mencapai sasaran, otoritas moneter harus memahami mengenai masalah bagaimana sektor perbankan akan bereaksi terhadap perubahan dalam kebijakan moneter secara lengkap. Dan pada kenyataannya bank terhubung dengan sektor riil melalui aktivitas penyaluran kredit (pembiayaan).

Dibutuhkan suatu instrumen yang lain agar dapat tercipta keseimbangan antara sektor riil dan sektor moneter, jadi kebijakan yang harus ditempuh adalah yang bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran uang secara bersama.⁷ Kita tidak dapat mengandalkan satu instrument kebijakan saja. Harus ditemukan cara untuk meningkatkan permintaan kredit (pembiayaan) dan mendorong investasi di sektor riil.

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang

⁷<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5949/1/98783-AHMAD%2520FAUZI-FSH.PDF&ved=2ahUKEwjKh6rzzdTxAhV273MBHVZIA60QFjAAegQIAxAC&usg=AOvVaw0WRjaWelzHpAZC2iW20csg> (diakses pada tanggal 9 Juli 2021)

baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Pemikiran M. Umer Chapra tentang instrumen kebijakan moneter. Dalam perekonomian dapat menjadi wacana yang penting untuk dipertimbangkan dan dikaji bahkan diimplementasikan lebih lanjut di Indonesia. Bukan hal yang mustahil untuk menerapkan pemikiran M. Umer Chapra ini di Indonesia.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternative sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

M. Umer Chapra percaya bahwa sebuah sistem moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Sehingga dapat membimbing manusia dalam upayanya menegakkan sistem ekonomi yang mengkombinasikan kemajuan ekonomi, keadilan dan menjamin standar hidup lebih tinggi yang melaju sama cepatnya dengan setandar moral yang tinggi.

Titik kelemahan Chapra dalam pemikirannya terdapat pada besarnya toleransi terhadap sebagian konsep Barat dalam proses Islamisasi Ilmu Ekonomi.⁸ Chapra tidak dengan tegas menolak sistem Barat dan menggunakan sistem perekonomian Islam secara murni, akan tetapi ia meminimalkan penggunaan beberapa instrumen ekonomi Barat yang dia rasa cukup penting untuk mempertahankan stabilitas ekonomi,³⁶ sebelum melepaskan sistem konvensional secara sempurna. Chapra berpendapat, proses Islamisasi harus dilakukan secara bertahap dan perlahan-lahan.

Proses perpaduan antara keilmuan Barat dan Islam yang saling melengkapi dalam diri Chapra, menjadikannya berada pada garis tengah, dimana beberapa konsep perekonomian Barat yang masih digunakan dalam dunia Islam, terutama dalam sistem perbankan, mendapatkan toleransi. Sebab Chapra menyadari bahwa pemurnian Syariah dalam perbankan tidak bisa dilakukan kecuali secara perlahan-lahan. Sehingga penghapusan konsep-konsep dan instrumen keuangan Barat juga harus dilakukan dengan bertahap. Oleh karena itu, Chapra menekankan adanya perbaikan moral pelaku ekonomi dan pemerataan distribusi sumber daya langka dan alokasi kredit kepada sektor yang lebih membutuhkan. Agar perekonomian negara menjadi mandiri, terlepas dari prinsip Barat dan mampu mewujudkan keadilan sosio-ekonomi yang menghantarkan kepada kesejahteraan sehingga masyarakat mampu mencapai falah.

⁸Aninda Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," (Ekonomi Islam, No.1, 2013), h. 173.

